

Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima NTB

Titian Khairat^{1*}, Maslichah², Dwiyani Sudaryanti³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : Titianpujikhairat@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of education and training on the level of understanding of public sector accounting. The population in this study were employees of the regional financial and asset management agency (BPKAD) Bima City, NTB. The population in the study were 70 employees of the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Bima, NTB. This study uses saturated sampling, where members of the population are used as samples. The data used is primary data. While the analysis technique used is multiple linear regression analysis. The result of this study is that education and training simultaneously affect the level of understanding of public sector accounting. While partially education and training affect the level of understanding of public sector accounting.

Keywords : *Education, training and level of understanding of public sector accounting*

PENDAHULUAN

Perusahaan negeri pasti membutuhkan akuntansi sektor publik sebagai acuan untuk membuat berbagai keputusan. Pemerintahan pusat serta daerah harus menggunakan akuntansi sejenis ini. Selain dua hal tersebut apa saja yang termasuk ke dalam sektor publik. Sektor publik meliputi LSM atau lembaga swadaya masyarakat, instansi pendidikan dan rumah sakit. Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dengan tujuan untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang memiliki sifat keuangan dari entitas pemerintah guna untuk mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak berkepentingan atas dasar alternatif arah tindakan (Halim, 2004:18)

Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008). Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar, yang di tandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Istilah reformasi merupakan cetusan untuk mendudukkan kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Sehingga reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam *good governance*.

Organisasi publik dapat berfokus pada peningkatan pelayanan berjangka panjang. Dengan kata lain, dampak pelayanan menuju kualitas kehidupan generasi berikut amat diperhatikan, seperti penyediaan infrastruktur dan alokasi dana publik. Tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Tuntutan reformasi ini menyebabkan demokratisasi pengelolaan organisasi melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, tuntutan ini lebih-lebih dikaitkan dengan bidang pengelolaan keuangan publik (Arifiyadi, 2008).

Dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, dibutuhkan sumber daya manusia yang siap pakai. Oleh sebab itu perlu diketahui kondisi sumber daya manusia yang di daerah tersebut.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan sangat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Pengembangan sumber daya manusia perlu terus dilakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berhasil (Nurcholis, 2007)

Sebelum Era Reformasi, peran akuntansi sektor publik di Indonesia dinilai kurang berkembang. Akibatnya sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat (swasta). Setelah Era Reformasi tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya *“good public and corporate governance”*, karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya.

Era Paska reformasi melahirkan kembali semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Otonomi daerah telah membawa jiwa dan semangat tersebut dalam desentralisasi daerah. Otonomi Daerah adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah (Manan, 2004:17). Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, secara otomatis, masing-masing daerah akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui berbagai usaha, seperti menggali potensi daerah seoptimal mungkin serta dan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Namun semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, belum terlihat perubahan dan dampak yang signifikan bagi perkembangan serta peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah pada umumnya terpaku pada pembangunan secara fisik semata dan keuntungan jangka pendek. Padahal, pemerintah daerah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pentingnya pemahaman akuntansi sektor publik untuk pegawai karena dengan memahami akuntansi sektor publik maka pegawai akan memahami atau meningkatkan kinerja yang sesuai dengan pemahamannya dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan seorang pegawai agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta diharapkan mampu mewujudkan tujuan-tujuan organisasi.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan proses penggolongan, pencatatan, serta pengikhtisaran dengan beragam metode tertentu dalam ukuran transaksi, moneter dan kejadian-kejadian yang sifatnya masuk ke dalam laporan penyelenggaraan pemerintah yang turut pada asas otonomi serta tugas pembantuan yang didasarkan pada prinsip otonomi pada prinsip dan sistem NKRI (Hafiz, 2006).

Perkembangan akuntansi sektor publik semakin pesat seiring dengan adanya kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini ialah mengubah sifat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara BUMN dengan pemerintah pusat, antara pemerintah dengan masyarakat, dan berbagai entitas lain dalam pemerintahan. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta melalui privatisasi (Mardiasmo, 2009).

Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari lima puluh tahun ini. Sehingga pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan berdampak kosongnya pengaturan praktik-praktik akuntansi di sektor publik itu sendiri. Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya perlu dilakukan. Salah satu yang amat substansial adalah konsensus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh (Hasibuan, 2005).

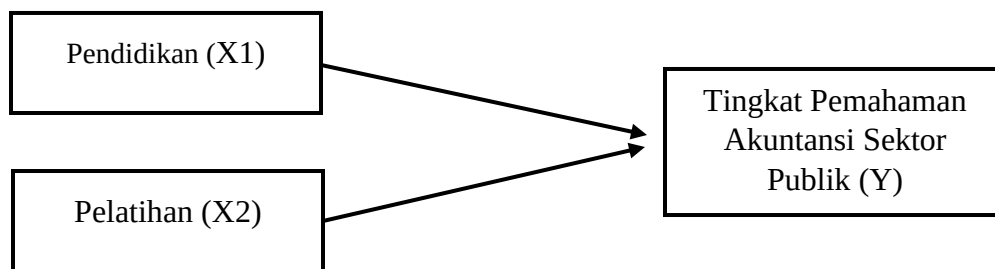
2. Tujuan Pendidikan

Didalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang atau mengenai sistem pendidikan nasional pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan pendidikan yaitu, mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman serta juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat di pandang secara sempit maupun luas (Mathis, 2002).

Kerangka Konseptual



Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas penelitian ini menguji apakah :

1. Bahwa terdapat pengaruh Pendidikan terhadap akuntansi sektor publik.
2. Bahwa terdapat pengaruh pelatihan terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik.

Hipotesis

H1: Ada pengaruh Pendidikan dan pelatihan terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik.

H1a: Ada pengaruh pendidikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik.

H1b: Ada pengaruh pelatihan terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh pegawai tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima NTB yang tercatat sebagai pegawai tetap hingga periode 31 Desember 2020.

Penelitian ini menggunakan sampling jenuh, dimana anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 70 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

Sampel dan kriteria responden pada penelitian ini adalah :

1. Pegawai tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima NTB
2. Pegawai tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sampai dengan tgl 31 Desember 2020.

Variabel Penelitian

Variabel Independen

1. Pendidikan (X1)

Pendidikan adalah pembelajaran, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang digunakan oleh Putri (2013) yang terdiri dari 5 pernyataan dengan skala likert 5 poin dari 1 (STS) sampai 5 (SS).

2. Pelatihan (X2)

Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir.

Variabel ini menggunakan instrumen yang digunakan oleh Putri (2013) yang terdiri dari 5 pernyataan dengan skala likert 5 poin dari 1 (STS) sampai 5 (SS).

Variabel Dependen

1. Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir.

Variabel ini menggunakan instrumen yang digunakan oleh Putri (2013) yang terdiri dari 5 pernyataan dengan skala likert 5 poin dari 1 (STS) sampai 5 (SS)

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran interval. Ukuran interval yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel ini adalah menggunakan skala *Semantic Differential*. Skala ini tersusun dalam satu garis kontinum dengan jawaban sangat positifnya terletak di sebelah kanan, jawaban sangat negatif terletak disebelah kiri atau sebaliknya (Sumarsono, 2004: 25)

Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer, yaitu sumber-sumber data yang merupakan bukti atau saksi utama.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari individu, kelompok-kelompok tertentu, dan juga responden yang telah ditentukan secara spesifik oleh peneliti yang memiliki data secara spesifik dari waktu ke waktu (Sekaran, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu teknik pengumpulan data atau informasi berupa pertanyaan yang akan disebarakan kepada responden, yaitu pegawai Bada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima NTB.

Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 1 : Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pendidikan (X1)	X1.1	0,558	0,1982	Valid
	X1.2	0,664	0,1982	
	X1.3	0,591	0,1982	
	X1.4	0,604	0,1982	
	X1.5	0,666	0,1982	
Pelatihan (X2)	X2.1	0,708	0,1982	Valid
	X2.2	0,730	0,1982	
	X2.3	0,750	0,1982	
	X2.4	0,795	0,1982	
	X2.5	0,704	0,1982	
Tingkat Pemahaman Akuntansi Sek tor Publik (Y)	Y.1	0,786	0,1982	Valid
	Y.2	0,761	0,1982	
	Y.3	0,732	0,1982	
	Y.4	0,723	0,1982	
	Y.5	0,674	0,1982	

Dari uji validitas di atas terdapat 30 item pernyataan, memiliki R_{hitung} lebih besar dari R tabel, sehingga disimpulkan semua item pernyataan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2 : Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	Keterangan
Pendidikan (X1)	0,694	Reliabel
Pelatihan (X2)	0,738	Reliabel
Pemahaman Akuntansi Sektor Publik (Y)	0,788	Reliabel

Dari hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Pendidikan, pelatihan, dan tingkat pemahaman akuntansi sektor publik, memiliki nilai *Cronbach alpha* > 0,6, sehingga disimpulkan variabel penelitian ini reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Pendidikan Pelatihan Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik				
N		70.000	70.000	70.000
Normal Parameters ^a	Mean	22.6143	20.9143	21.9000
	Std. Deviation	1.844	3.063	2.627
Most Extreme Differences	Absolute	.226	.197	.148
	Positive	.112	.091	.119
	Negative	-.226	-.197	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		1.888	1.647	1.238
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002	.009	.093

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* yang diketahui nilai signifikansi variabel pendidikan (X1) $1,888 > 0,02$, variabel pelatihan (X2) $1,647 > 0,09$, dan variabel tingkat pemahaman akuntansi sektor publik (Y) $1,238 > 0,93$, maka dapat disimpulkan variabel (X1), (X2), dan (Y) berdistribusi normal.

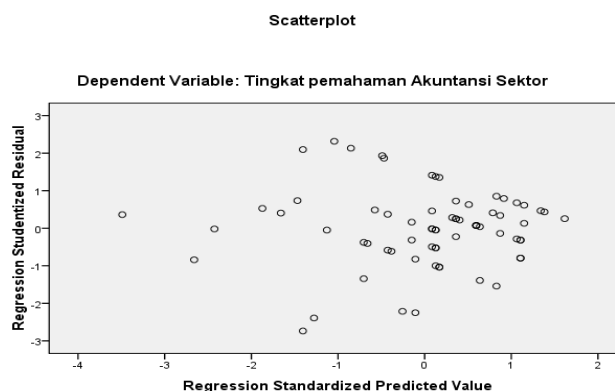
Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperoleh dari nilai *tolerance* variabel pendidikan $0,904 > 0,10$ atau nilai $VIF < 5$. ($1,106 < 5$), Variabel pelatihan nilai VIF sebesar $(1,106) < (5)$ Berarti dapat dijelaskan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas terpenuhi dan dengan demikian data tersebut dapat memberikan informasi yang berbeda untuk setiap variabel bebasnya.

2. Uji Heterokedastisitas

Gambar 1



Uji Heterokedastisitas dapat dilihat dari titik-titik menyebar secara acak tidak

membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menjelaskan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi berdasarkan variabel independen

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a									
Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.146	3.245			1.278	.206		
	Pendidikan	.441	.146		.309	3.025	.004	.904	1.106
	Pelatihan	.373	.088		.434	4.251	.000	.904	1.106

a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

Dari tabel tersebut, terdapat model regresi seperti berikut :

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2$$

$$Y = 4,146 + 0,441 X_1 + 0,373 X_2$$

Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t
Tabel 5 Uji t
Coefficients^a

1	(Constant)	4.146	3.245		1.278	.206		
	Pendidikan	.441	.146	.309	3.025	.004	.904	1.106
	Pelatihan	.373	.088	.434	4.251	.000	.904	1.106

a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian tabel 4.11, diperoleh hasil pengujian bahwa variabel pendidikan berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Sektor Publik, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan variabel pendidikan yaitu $\text{sig. } 0,004 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,025 > t$ tabel 1.667 maka H_1 diterima dan h_0 ditolak. Demikian diambil kesimpulan bahwa variabel pendidikan (X_1) berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Sektor Publik (Y).
2. Berdasarkan pengujian tabel 4.11, diperoleh hasil pengujian bahwa variabel pelatihan berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Sektor Publik, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan variabel pendidikan yaitu $\text{sig. } 0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $4,251 > t$ tabel 1.667 maka H_1 diterima dan h_0 ditolak. Demikian diambil kesimpulan bahwa variabel pelatihan (X_2) berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Sektor Publik (Y).

2. Uji F

Uji F
Tabel 6 Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	175.013	2	87.506	19.460	.000 ^b
	Residual	301.287	67	4.497		
	Total	476.300	69			

a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

b. Predictors: (Constant), Pelatihan, Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa angka F sebesar $19,460 > 3,13$ dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 yang berarti model yang dihasilkan adalah cocok atau sesuai untuk mengetahui pengaruh pendidikan (X_1) dan pelatihan (X_2) berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik (Y).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.606 ^a	.367	.349	2.121	2.046

a. Predictors: (Constant), Pelatihan, Pendidikan

b. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan dalam penelitian ini sebesar 0,367 yang artinya variabel pendidikan dan pelatihan mampu mempengaruhi variabel tingkat pemahaman akuntansi sektor publik sebesar 36% sedangkan sisanya 64% dipengaruhi oleh faktor lain tidak dibahas pada penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik.
2. Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi sektor publik.
3. Pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi sektor publik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bima NTB, memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima NTB, hendaknya memperhatikan pendidikan dan pelatihan pegawai agar tingkat pemahaman akuntansi sektor publik meningkat. Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan perlu dipertahankan keberadaannya. Hal ini penting karena searah dengan pengembangan organisasi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim . 2008, *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Pencetakan STIM YKPN Hlm. 35.
- Arifiyadi, Teguh. (2008). *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta.
- Hafiz. 2006, *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, S.P Malayu. 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Marthis, Robert L. 2002, *Manajemen sumber daya Manusia*. Salemba: Jakarta.
- Manan, Bagir. 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : FH-UII Press. Hlm 17
- Roni, Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Simamora. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi YKPN.
- Sekaran, Uma. 2006, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.